

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara yang menempati urutan kedua sebagai penyumbang limbah ke laut setelah China, disusul oleh Filipina, Vietnam dan Srilangka¹.

Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang akibat dapat ditimbulkan oleh sampah dan kurangnya dana pemerintah untuk mengupayakan pembuangan sampah yang tepat dan berkualitas. Faktor lain yang menyebabkan permasalahan sampah di Indonesia semakin rumit adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan.

Pertambahan jumlah penduduk, Perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah, jenis, keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok serta meningkatnya usaha dan kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah.

¹ <https://sampahlaut.id/2022/07/03/indonesia-penyumbang-sampah/diakses:pada tanggal 2 februari 2023 pukul 11.30>

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimiawi sampah dapat digolongkan menjadi: 1) terdapat sampah yang mudah terurai terdiri dari sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, dan lain-lain 2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain 3) limbah berupa debu/abu 4) limbah yang berbahaya bagi kesehatan, seperti sampah yang berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia.

Sampah banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup mendesak. Karena tempat umum adalah tempat pertemuan untuk semua orang. Dengan demikian, tempat umum harus memenuhi syarat kesehatan dalam arti melindungi, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Salah satu tempat umum yang menghasilkan sampah adalah pasar. Pasar merupakan tempat terbuka dimana terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan oleh proses tawar menawar. Pasar merupakan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi, dimana fungsi lembaga pasar ini sebagai lembaga ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas yang

dilakukan oleh pembeli dan pedagang. Di pasar pengunjung tidak selalu pembeli, tetapi pengunjung juga bisa menjadi penjual, bahkan semua orang bisa menjual dagangannya di pasar. Pasar sendiri menjadi sektor ekonomi yang sangat penting bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Banyak masyarakat miskin yang menggantungkan hidupnya pada pasar, menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan pekerjaan alternatif ditengah banyaknya pengangguran di Indonesia.²

Berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan antara lain: 1). Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. 2). Sampah telah menjadi masalah nasional sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara menyeluruh dan terpadu. 3). Pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan, tanggung jawab dan manusia, serta dunia usaha agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.³

² Eis Al Masitoh, *Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional (studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul)*, Jurnal PMI, 2014, Vol. X. No. 2.

³ [UU 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah \(jogloabang.com\)](http://jogloabang.com) diakses pada tanggal 24 januari 2023 pukul 19.55 wib

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dari segi kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dinilai baik apabila sampah tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit dan sampah tidak menjadi perantara penyebaran suatu penyakit. Persyaratan lain yang harus dipenuhi, adalah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai estetika), tidak menimbulkan kebakaran dan lain-lain.

Jika dilihat dari berbagai referensi dan pengalaman dari berbagai Negara, masalah sampah sebenarnya berjalan seiring dengan budaya masyarakat itu sendiri. Semakin maju tingkat penguasaan teknologi, industri dan budaya suatu masyarakat. Volume sampah yang besar dan berbagai jenisnya jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang kompleks dan serius, antara lain: 1). pencemaran air 2). Polusi udara 3). sampah merupakan habitat perkembangannya bakteri 4). mengurangi nilai estetika lingkungan 5). mengurangi kenyamanan lingkungan.

Sampah telah menjadi masalah besar, Sama seperti di kabupaten Bengkulu utara, terdapat beberapa pasar yang berada di kabupaten Bengkulu utara yang salah satunya adalah pasar purwodadi. Pasar tradisional ini terletak di kecamatan argamakmur kabupaten Bengkulu utara. Pasar purwodadi ini merupakan pasar terbesar dikecamatan

argamakmur yang beroperasi setiap hari. Pasar ini melayani berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat yang tinggal disekitarnya. Hari demi hari pasar ini berkembang dan semakin banyak pedagang yang berdatangan. Ini menciptakan masalah yang perlu diselesaikan.

Permasalahan yang muncul antara lain pasar sebagai salah satu penyumbang sampah terbesar dikecamatan argamakmur. Sampah yang menumpuk di pinggir pasar yang tersebar di beberapa titik pasar, hal ini mengganggu pasar baik secara visual maupun bau yang ditimbulkan dari sampah yang menumpuk. Kondisi ini semakin parah ketika hujan tiba dimana curah hujan diwilayah Argamakmur memiliki kondisi curah hujan yang cukup tinggi.

Jika pasar tidak bersih maka akan mempengaruhi kualitas kesehatan, seperti makanan yang dibeli oleh pembeli dan berbagai hasil olahan yang dijual oleh pedagang. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik dipasar tradisional tersebut. Jika permasalahan ini tidak terdapat penanganan yang tepat, baik secara teknis maupun politis, dalam waktu yang dekat diprediksi akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang signifikan diseluruh pasar tradisional secara langsung maupun tidak langsung serta berkurangnya estetika atau citra kecamatan argamakmur sebagai sebuah kecamatan yang mengiginkan kebersihan.

Kebersihan lingkungan pasar menjadi faktor penting dalam menentukan kepuasan konsumen terutama mengenai tempat, karena para pembeli menginginkan tempat yang sehat, bersih dan bebas penyakit dalam mendapatkan kebutuhan makanan khususnya.⁴ Jika lingkungan terlihat kotor dan tidak terawat, hal ini sangat berdampak pada kesehatan pembeli dan pedagang yang berada disekitar lingkungan tersebut dan akan menimbulkan bau dan penyakit, tidak hanya berdampak pada manusia tetapi juga berdampak pada makanan atau jualan yang ada disekitarnya. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan pasar menjadi faktor yang harus selalu dijaga.

Sebenarnya Ada empat lokasi yang dijadikan tempat pengumpulan sampah dipasar purwodadi yang berada tepat dipinggir jalan utama pasar. Hal ini untuk memudahkan truk sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bengkulu Utara saat mengangkut sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Ada 8 truk sampah yang bertugas mengangkut sampah di 19 kecamatan di Bengkulu Utara. Setiap bulan mereka melakukan 267 rit perjalanan angkutan. kecamatan Argamakmur merupakan wilayah yang paling banyak menghasilkan sampah.⁵ Timbulan sampah di kecamatan

⁴ Retno Widyati, Yuliarsih, *Higienis dan Sanitasi* (Jakarta: P.T Grasindo 2002).h.23

⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bengkulu Utara, 2017. *Data Timbulan Sampah Kabupaten Bengkulu Utara.*{22 Oktober 2018}

Argamakmur tahun 2016-2018 mencapai 76.672kg/hari dengan penduduk sebanyak 127.848 jiwa.

Pada tahun 2017 pasar menyumbang sampah sebanyak 3.750kg/hari atau sekitar 9,94% dari total sampah yang ada di kecamatan Argamakmur. Dari fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih terdapat area yang dimanfaatkan pedagang dan pengunjung pasar sebagai tempat membuang sampah dan bukan di tempat membuang sampah. Banyak sampah yang dikumpulkan di satu titik oleh pedagang setempat dengan alasan jauh dari lokasi tempat pembuangan sampah sementara. Sehingga pengunjung yang lalu lalang di pasar juga membuang sampah sembarangan. Tong sampah juga sangat minim di dalam pasar ini.

Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di pasar Purwodadi juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal disekitar pasar. Setiap pagi mereka juga membawa sampah dari rumah ke TPS sekaligus akan berbelanja dipasar. Dengan kondisi bak penampungan sampah yang ada juga tidak memadai untuk menampung sampah yang ada setiap harinya dan kondisinya juga sudah rusak. Sehingga sampah yang ada keluar dari bak ke pinggir jalan,dan akan berserakan saat anjing liar datang.

Melihat fenomena tersebut, pemerintah kabupaten Bengkulu Utara membuat kebijakan untuk menunjukkan keseriusannya dalam menangani permasalahan sampah,seperti:

Peraturan Bupati Bengkulu Utara nomor 12 tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Kelas A Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana tugas dari UPTD pengelolaan sampah ini ialah melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas lingkungan hidup di bidang pengelolaan sampah di kabupaten Bengkulu Utara. Dimana untuk menjalankan tugasnya UPTD pengelolaan sampah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle Kabupaten
2. Pelaksanaan, pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/ residu dari sumber sampah, Tempat Pengelolaan Sampah dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle ke Tempat Pembuangan Akhir dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kabupaten
3. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi
4. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas); Pelaksanaan

perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar

5. Fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pengelolaan Sampah, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle, Tempat Pembuangan Akhir dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kabupaten
6. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten
7. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengolahan dan pemrosesan akhir Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu/Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten
8. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau
9. Pelaksanaan pengembangan taman-taman kota dan pemeliharaan sarana dan prasaranan ruang terbuka hijau
10. Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau

11. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan.⁶

Sedangkan untuk Peraturan Bupati Bengkulu Utara nomor 10 tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Purwodadi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara kelas A, dimana tugas dari UPTD pasar purwodadi sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang perdagangan pada dinas perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara. Yang mana untuk melaksanakan tugasnya UPTD pasar purwodadi mempunyai fungsi, antara lain:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan di lingkup UPTD Purwodadi
2. Pelaksanaan penyediaan, pembinaan dan pengaturan para pedagang pasar untuk menciptakan pasar yang aman, tertib dan bersih
3. Pelaksanaan penarikan retribusi pasar dan pendapatan asli daerah (PAD) pasar lainnya yang bersumber dari penggunaan pasar
4. Pemberian layanan informasi kegiatan pasar
5. Pemberian layanan administrasi kepada para pedagang

⁶ Perbub kab.bengkulu utara nomor 12 tahun 2018 tentang *unit pelaksana teknis daerah pengelolaan sampah kelas A pada dinas lingkungan hidup kabupaten Bengkulu utara{jdiuh bpk ri}*

6. Penyusunan, pengadaan dan pengelolaan sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar
7. Pelaksanaan pendataan/ inventarisasi jumlah pedagang dan sarana prasarana pasar
8. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan di bidang pengelolaan pasar
9. Pelaksanaan urusan tata usaha pasar
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pasar
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.⁷

Namun berdasarkan kebijakan di atas, masalah sampah di pasar Purwodadi hingga saat ini belum juga terselesaikan. Masih jauh dari memadai apabila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis.

Ada juga beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Bengkulu Utara dalam rangka mengurangi sampah di pasar Purwodadi seperti dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda nasional tahun 2018, pembersihan titik-titik di terminal purwodadi dan area pasar, peningkatan kebersihan dan ketertiban di seluruh area badan jalan dan terminal pasar purwodadi guna menjaga kenyamanan pasar, dan baru-baru ini seperti

⁷ Perbub kab.bengkulu utara no.10 tahun 2018 tentang *unit pelaksana teknis daerah pasar purwodadi pada dinas perdagangan kabupaten Bengkulu utara kelas A{jdh bpk ri}*

menyambut Adipura. Namun hal tersebut belum membuahkan hasil yang baik dan cocok untuk mengurangi sampah yang ada karena kegiatan tersebut hanya dilakukan pada saat ada acara atau kegiatan besar setelah acara atau kegiatan besar tersebut selesai pasar kembali menjadi kumuh kembali karena tidak tersentuh lagi oleh pemerintah. Hal seperti ini tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa pasar purwodadi masih menjadi penyumbang sampah terbesar dikecamatan Argamakmur jika kegiatan tersebut tidak dilakukan secara rutin.

Walaupun kebijakan dan kegiatan telah dilaksanakan, namun kenyataannya dapat dilihat dari hasil observasi awal peneliti sebagai berikut: “ *Dipasar Purwodadi, masih terlihat kotor karena sampah yang berserakan dan menumpuk mulai dari pintu masuk pasar. Dapat dilihat berbagai macam sampah seperti sampah plastik, sisa buah dan sayuran, kertas dan lain sebagainya. Ada juga beberapa bangunan toko di pasar purwodadi yang telah menjadi tempat sampah akibat kebakaran beberapa waktu lalu. Kondisi ini sempat membuat pedagang disekitar toko mengeluh karena bau tak sedap dan banyak lalat berterbangan di atas tumpukan sampah.*”⁸

Adapun mekanisme sebagai pemerintahan Negara dalam membuat kebijakan dalam konsteks fiqh siyasah.

⁸ Observasi awal pada tanggal 29 januari 2023

Abdul Wahhab Al-khallaf mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan⁹ suatu Negara tentunya diperlukan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu Negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu Negara tentu akan sangat kacau, oleh karena itu diperlukan aturan atau kebijakan untuk menata dan membentuk tanggung jawab pemerintahan. Oleh karena itu, agar peraturan dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, maka harus ada pimpinan yang mengatur dan memeliharanya.

Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri menjadi dua kelompok yaitu ulil amri agama yaitu mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*), dan ulil amri duniawi yaitu yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan dewan eksekutif.¹⁰ Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundangundangaan seperti Diwan

⁹ Rapung Sammuddin, *"Fiqh Demokrasi"*, Jakarta:Gozian Press,2013,h 50

¹⁰ Munawir Sjadzali, *"Islam Dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)"*, Edisi 5, Jakarta: UI Press 1993, h 48

al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait almāl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.¹¹

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).¹²

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga

¹¹ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31

¹² Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹³

Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁴

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undangundang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik

¹³ Ibid., 12.

¹⁴ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis, 7.

masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.¹⁵

Begitu juga dengan Ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Kelas A Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara, Perbub ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat lebih tertib dalam menjaga kebersihan dan membuat masyarakat lebih memahami bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan kerugian dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Misalnya seperti membuang sampah sembarangan yang akan menyebabkan banjir, penyakit dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas,hal itulah yang menjadi latar belakang penulis sehingga penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut terkait kebijakan pengelolaan sampah yang ada di pasar purwodadi kabupaten Bengkulu utara.

Judul yang di ambil oleh penulis adalah :
**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
BENGKULU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
(UPTD) PENGELOLAAN SAMPAH KELAS A
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN**

¹⁵ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.

**BENGKULU UTARA PERSPEKTIF SIYASAH
TANFIDZIYAH (Studi Pengelolaan Sampah Di Pasar
Purwodadi)**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi peraturan bupati Bengkulu Utara nomor 12 tahun 2018 tentang updt pengelolaan sampah di pasar purwodadi kabupaten Bengkulu Utara?
2. faktor pendukung dan penghambat peraturan bupati Bengkulu Utara nomor 12 tahun 2018 tentang updt pengelolaan sampah di pasar purwodadi kabupaten Bengkulu Utara perspektif siyasah tanfidziyah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi peraturan bupati Bengkulu Utara nomor 12 tahun 2018 tentang updt pengelolaan sampah di pasar purwodadi kabupaten Bengkulu Utara
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peraturan bupati Bengkulu Utara nomor 12 tahun 2018 tentang updt pengelolaan sampah di pasar purwodadi kabupaten Bengkulu Utara perspektif siyasah tanfidziyah

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua kalangan dan

memberikan sumbangan pengetahuan hukum tata Negara (siyasah) yang berkaitan tentang kebijakan pengelolaan sampah di pasar purwodadi kabupaten Bengkulu Utara

- b. Saran atau acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terutama dibidang ilmu hukum

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Purwodadi kabupaten Bengkulu Utara sehingga dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi civitas akademik yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

- b. Selain itu manfaat penelitian ini ditujukan pula bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Hukum Tata Negara pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk menghindari penelitian dengan pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama yakni membahas tentang “Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Utara

Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Pengelolaan Sampah Kelas A Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Pengelolaan Sampah Di Pasar Purwodadi)”. Maka perlu dilakukan kajian terhadap karya ilmiah yang terdahulu mengenai pengelolaan sampah di Pasar Purwodadi kabupaten Bengkulu Utara yaitu,sebagai berikut:

1. Skripsi Yusrival fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Bukit Asri Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.” Yang mana hasil penelitiannya adalah masih lemahnya pengawasan dan kontrol dari pemerintah dan dinas terkait terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah sehingga penanganan sampah masih belum maksimal ditandai dengan masih minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPS bukit asri serta terbatasnya SDM yang bekerja di bikut asri. Hal ini diakibatkan terbatasnya dana di TPS sehingga diharapkan bantuan dari pemerintah daerah atau dinas terkait agar dapat menghadirkan solusi dari permasalahan yang di alami di TPS.¹⁶

¹⁶ Yusrival,*implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah (TPS) bukit asri kecamatan gantarang kabupaten ulukumba*.diakses https://digilibadmin.unismuh.ac.id/uplo ad/31808-Full_Text.pdf pada tanggal 25 januari 2023 pukul 12.28 wib

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintahan setempat dan terjadinya perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis terletak di perbedaan tempat penelitian yang mana peneliti terdahulu meneliti kebijakan pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah yang ada di TPS bukit asri kecamatan gantarang kabupaten bulukumba sedangkan penulis meneliti kebijakan pengelolaan sampah di pasar purwodadi kecamatan Argamakmur kabupaten Bengkulu Utara serta penelitian yang dilakukan oleh penulis ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah.

2. Skripsi Elena fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas hasanuddin Makassar dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labukkang Kota Pare-Pare.” Yang mana hasil dari penelitiannya ialah implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kelurahan labukkang kota pere-pare dapat dikatakan belum berjalan maksimal dari segi masyarakatnya karena masih banyaknya masyarakat yang tidak melakukan pengurangan sampah sedangkan dari segi penanganan sampah pemerintah bkelurahan labukkang sudah melakukan dari pemilahan, pengumpulan ,

pengangkutan dan pengelolaan namun belum sampai ketahap pemrosesan akhir.¹⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang kebijakan pengelolaan sampah dan perbedaan yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penulis adalah perbedaan tempat penelitian yang mana peneliti terdahulu meneliti kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Labukkang kota Pare-pare sedangkan penulis meneliti kebijakan pengelolaan sampah di pasar Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara serta penelitian yang dilakukan oleh penulis ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah.

3. Jurnal Yayan Maryana dkk Universitas Galuh Ciamis Indonesia dengan judul “Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran (Studi Analisis Di Kecamatan Pangandaran).” Yang mana hasil penelitiannya adalah adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sehingga belum optimal hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas terhadap standar atau aturan dalam melakukan pengelolaan sampah, kurangnya dukungan sumber-sumber kebijakan

¹⁷ Elena, *implementasi kebijakan pengelolaan sampah dikelurahan labukkang kota pare-pare*. Diakses <https://dokumen.tips/documents/skripsi-implementasi-kebijakan-pengelolaan-sampah-di-.html?page=1> pada tanggal 25 Januari 2023 pada pukul 12.35 WIB

dalam melaksanakan pengelolaan sampah selain itu kurangnya pemahaman yang sama diantara petugas dalam melakukan pengelolaan sampah. Kurangnya komunikasi dengan berbagai pihak terkait dalam melaksanakan pengelolaan sampah serta kurangnya dukungan lingkungan ekonomi sosial dan politik dalam memperlancar pengelolaan sampah. Adanya berbagai hambatan-hambatan yang antara lain kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan pengelolaan sampah serta kurangnya dukungan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dan operasional pengelolaan sampah.¹⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang kebijakan pengelolaan sampah dan perbedaan yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penulis adalah perbedaan tempat penelitian yang mana peneliti terdahulu meneliti kebijakan pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan pangandaran (studi analisis dikecamatan pangandaran) sedangkan penulis meneliti kebijakan pengelolaan sampah di pasar purwodadi kecamatan argamakmur kabupaten Bengkulu utara serta

¹⁸ Yayan maryana dkk, *implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten pangandaran(studi analisis di kecamatan pangandaran)*. diakses 158.Yayan Maryana.pdf (unigal.ac.id) pada tanggal 25 januari 2023 pukul 12.44 wib

penelitian yang dilakukan oleh penulis ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat.¹⁹

1). Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada dinas yang berhubungan langsung. Dengan pembahasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰

b. Pendekatan penelitian

Untuk memecahkan masalah hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai landasan untuk

¹⁹ Mukti Fajar Dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatife*, 2010

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranamedia Group, 2005, H 3

menyusun argumentasi yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
- 2) Pendekatan Historis (Historical Approach)
- 3) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)
- 4) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara meninjau peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini misalnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²²

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 133

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 24

yang berkaitan Dengan masalah huku yang dikaji. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tema/masalah dan permasalahan yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2). Waktu dan lokasi penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara serta ditempat lokasi objek penelitian yaitu pasar Purwodadi. Penelitian berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 1 maret-31 maret 2023.

3). Informan penelitian

informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan masalah yang akan diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan informan secara acak, namun melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan oleh peneliti sendiri sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Informan yang akan peneliti wawancarai adalah:

Tabel 1.1

No	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1	Rison Sahri,S.IP	Dinas lingkungan hidup	Kepala UPTD pengelolaan sampah
2	Sari Deka Hasmelita,A.Md	Dinas perdagangan	Kepala UPTD pasar purwodadi
3	Lola monika	Masyarakat	Pedagang

4). Sumber data penelitian

Sumber data pada penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer, data skunder dan tersier.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan dilakukan peneliti dengan cara wawancara antara responden dan pengamat terhadap obyek yang diteliti yaitu Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara serta masyarakat yang tinggal disekitar pasar purwodadi.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku kepustakaan,perundang-undangan,browsing

internet dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait tentang pengelolaan sampah.

3. Data tersier

Pengumpulan data yang dilakukan penulis Dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara.

5). Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini juga merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.²³

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah dipasar purwodadi kabupaten Bengkulu utara.

2. Wawancara

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan secara lisan yang dilakukan kepada responden dicatat atau direkam. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan

²³ Cholid Nnarbuko Dan Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara2005), Hlm 70

dicatat atau direkam. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan responden wawancara.²⁴

Peneliti melakukan wawancara Dengan beberapa narasumber diantaranya:

1. Wawancara Dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Bagian Uptd Pengelolaan Sampah
2. Wawancara Dengan Pihak Dinas Perdagangan Bagian Uptd Pasar Purwodadi
3. Wawancara Dengan masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Purwodadi

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (empat) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika

²⁴ Surahman Dkk, *Metode Penelitian* , (Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan), Hlm, 149.

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 176.

penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB 1, Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu Dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II, Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah dusturiyah.

BAB III, bab ini merupakan gambaran umum tentang deskripsi wilayah penelitian, yang berisi mengenai profil singkat informan dan gambaran umum kebijakan pengelolaan sampah dipasar purwodadi kabupaten Bengkulu utara.

BAB IV, Bab ini merupakan pembahasan, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Pengelolaan Sampah Di Pasar Purwodadi)**

BAB V, Bab ini merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan berdasarkan

pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

